

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

*“First of all, human capital is considered one of the major factors in explaining a countries’ remarkable economic growth”*

*- Jong-Wha Lee -*

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil estimasi model pertama menyimpulkan bahwa tingkat stok modal secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Kenaikan 1% ada stok modal akan meningkatkan 0,49% pertumbuhan ekonomi atau output provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan stok modal memainkan peranan yang sangat penting bagi peningkatan kemakmuran masyarakat Indonesia.
- b. Hasil estimasi model pertama juga menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Hal tersebut terbukti bahwa tenaga kerja berkontribusi sebesar 0,37% terhadap peningkatan output perekonomian provinsi. Walaupun demikian, hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas total masyarakat yang bekerja cukup banyak, tetapi secara umum tingkat produktivitasnya sangat rendah.

- c. Model pertama dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan mutu modal manusia memiliki kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Namun demikian, tingkat mutu modal manusia atau *total factor productivity* masih sangat kecil berkontribusi terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari koefisien mutu modal manusia, yaitu sebesar 0,14%. Mutu modal manusia belum menjadi faktor penting peningkatan pertumbuhan daerah. Rata-rata masyarakat mengenyam pendidikan belum menjadi faktor penting peningkatan produktivitas untuk secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.
- d. Berdasarkan perhitungan sederhana, model kedua dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi fenomena perbedaan pertumbuhan regional (*regional growth disparities*) di provinsi-provinsi Indonesia dari segi tingkat pertumbuhan output, tingkat pertumbuhan stok modal, tingkat pertumbuhan tenaga kerja, tingkat pertumbuhan mutu modal manusia, output per tenaga kerja, dan output per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar pada provinsi-provinsi di Indonesia, seperti pada Sulawesi Utara, Riau, NTB, dan Jawa Tengah disebabkan oleh dominasi kegiatan ekonomi yang banyak berkuat pada sektor industri, utamanya adalah industri pengolahan. Dari hasil penelitian di atas, sektor pertanian juga masih menjadi sektor yang kuat mendukung perekonomian provinsi-provinsi dengan tingkat output terbesar tersebut. Terakhir, tingkat pertumbuhan output yang besar juga disebabkan masih kecilnya *scope* ekonomi provinsi-provinsi tersebut, artinya provinsi yang baru saja tumbuh tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang sudah cukup lama tumbuh dan memiliki *scope* ekonomi yang besar (nilai PDRB tahun 2007 atas dasar harga konstan jauh di atas rata-rata nilai PDRB tahun 2007 atas dasar harga konstan provinsi-provinsi di Indonesia), seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
- e. Hasil estimasi model ketiga menyimpulkan bahwa rata-rata lama masyarakat bersekolah secara signifikan terbukti meningkatkan level perkembangan

manusia provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hipotesis Barro dan Lee (1996) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rata-rata masyarakat mengenyam pendidikan, misalnya rata-rata pendidikan masyarakat adalah lulusan perguruan tinggi atau lulusan sekolah menengah atas, maka mutu modal manusia di masyarakat tersebut akan meningkatkan.

- f. Hasil estimasi model ketiga juga menyimpulkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap perkembangan manusia Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka akan semakin baik pula tingkat perkembangan manusia atau *human capital* di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa semakin makmur masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu modal manusia walaupun tidak semua tingkat pendapatan dibelanjakan pada investasi *human capital* (tidak signifikan). Walaupun demikian, pengaruh PDRB per kapita terhadap perkembangan manusia tidak signifikan disebabkan PDRB per kapita bukan merupakan indikator kemakmuran yang baik karena tidak menggambarkan pemerataan pendapatan.
- g. Hasil estimasi model ketiga juga menyimpulkan bahwa keterbukaan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia ternyata secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan perkembangan manusia provinsi-provinsi di Indonesia. *Open trade regime* menjadi faktor utama peningkatan itu. Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan rasio nilai ekspor dan impor per PDRB akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah yang selanjutnya dapat digunakan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu modal manusia Indonesia.
- h. Hasil estimasi model ketiga juga menyimpulkan bahwa pemerataan pendapatan berpengaruh secara positif terhadap peningkatan perkembangan manusia Indonesia. Peningkatan pada koefisien gini akan menurunkan mutu modal manusia, artinya distribusi pendapatan secara merata akan menjamin pada peningkatan pertumbuhan mutu modal manusia. Hal ini sesuai dengan

teori Barro dan Lee (1996). Walaupun demikian, gini bukan merupakan komponen yang baik karena hanya menggambarkan pemerataan pendapatan yang bisa jadi mengalami fenomena *relatif poverty*. Nilai koefisien gini yang rendah bisa jadi terdapat pemerataan pendapatan, tetapi mungkin sama-sama miskin dibandingkan dengan wilayah atau provinsi yang memiliki nilai koefisien gini tinggi yang berarti terjadi kesenjangan. Namun demikian, hal itu bukan berarti tidak dapat meningkatkan *human capital* bila ternyata penduduk paling miskin (*relative poverty*) memiliki daya beli cukup besar pada sektor pendidikan, seperti di negara-negara maju.

- i. Hasil estimasi model ketiga juga menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap perkembangan manusia. Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah provinsi pada sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu modal manusia atau perkembangan manusia Indonesia. Walaupun demikian, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perkembangan manusia tidak signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan belum secara efektif dan efisien mendukung perkembangan mutu modal manusia, bahkan bila disalahgunakan, misalnya dikorupsi atau tidak tepat sasaran, pengeluaran tersebut justru berpengaruh negatif pada perkembangan manusia Indonesia.
- j. Hasil estimasi model keempat menyimpulkan bahwa peningkatan rasio jumlah lulusan sekolah menengah atas, lulusan perguruan tinggi, dan jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur terhadap total populasi berpengaruh positif pada perkembangan sebuah provinsi atau kota yang *diproxy* dari rasio jumlah penduduk kota per jumlah populasi total. Perusahaan-perusahaan (*firms*) akan membuka pabriknya pada daerah yang mutu modal manusianya baik. Peningkatan masyarakat dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi pada suatu daerah atau provinsi akan menarik perusahaan-perusahaan untuk membuka pabriknya pada daerah tersebut. Sedangkan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor

manufaktur akan menciptakan *spillover effect* yang *mengenerate* ide baru. Hal-hal tersebut akan menyebabkan berkumpulnya perusahaan-perusahaan pada daerah tersebut (*agglomeration economies*). *Agglomeration economies* ini selanjutnya akan meningkatkan produktivitas dan upah pekerja. Tingkat upah yang relatif besar dari suatu daerah dengan daerah lain akan mendorong penduduk dari daerah lain untuk pindah dengan motif memperoleh tingkat gaji yang layak. Hal ini akan meningkatkan rasio jumlah penduduk perkotaan per jumlah total populasi pada suatu daerah atau kawasan.

## 5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah

- a. Pemerintah pusat dan daerah harus terus meningkatkan iklim investasi, baik untuk investor asing maupun untuk investor lokal. Hal tersebut disebabkan peran modal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Selain itu, pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan harus terus ditingkatkan. Lebih jauh, insentif masyarakat untuk menabung harus ditingkatkan sehingga investasi juga meningkat sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Pemerintah harus secara serius meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan dengan pelatihan dan pendidikan sehingga kontribusi tenaga kerja Indonesia lebih besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mutu modal manusia juga mutlak harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Pemerintah harus meningkatkan perhatiannya pada sektor pendidikan dengan peningkatan anggaran yang efektif dan efisien, serta meningkatkan program-program pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kerja Indonesia
- c. Fenomena perbedaan pertumbuhan regional (*regional growth disparities*) harus membuat pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat melakukan

prioritas pembangunan ekonomi daerah. Provinsi dengan tingkat PDRB dan pertumbuhan yang masih rendah harus lebih diprioritaskan dari provinsi-provinsi lain yang relatif lebih makmur. Hal ini bisa dikongretkan dari pembagian DAU dan DAK yang bersifat adil, efektif, dan efisien, sehingga di masa yang akan datang diharapkan terjadi kovergensi ekonomi atau kesamaan level ekonomi di antara provinsi-provinsi di Indonesia.

- d. Rata-rata lama sekolah secara signifikan berpengaruh pada tingkat perkembangan manusia. Namun demikian, pemerintah secara umum harus lebih fokus pada peningkatan *skills* yang lebih *match* dengan dunia kerja sehingga produktivitas dapat meningkat, bukan pada lamanya masyarakat bersekolah selama hal tersebut tidak memberikan peningkatan produktivitas dan kualitas mutu modal manusia.
- e. Pemerintah pusat dan daerah harus terus melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengingat tingkat PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu modal manusia. Pembukaan lapangan kerja baru sangat penting sehingga daya beli masyarakat, khususnya untuk berinvestasi dalam peningkatan mutu modal manusia, dapat meningkat.
- f. Walaupun di antara provinsi-provinsi di Indonesia sistem perdagangannya tidak seperti sistem perdagangan antara negara-negara di dunia, pemerintah harus terus melakukan *open trade regime*, artinya provinsi-provinsi di Indonesia harus secara kondusif melakukan perdagangan antara daerah, sehingga terjadi peningkatan rasio ekspor dan impor per PDRB yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan mutu modal manusia.
- g. Usaha pemerintah dalam pemerataan pendapatan masih harus diteruskan. Pemerataan pendapatan terbukti secara statistik berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu modal manusia. Dengan alasan tersebut, pemerintah harus

lebih fokus pada program peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataannya.

- h. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan harus lebih efektif dan efisien sehingga dapat secara positif meningkatkan mutu modal manusia Indonesia. Selama ini, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan belum efektif dan efisien sehingga pemerintah harus lebih selektif dalam mengeluarkan dana.
- i. Dalam tujuannya untuk perkembangan sebuah kota atau provinsi yang diukur dari peningkatan rasio jumlah penduduk kota per jumlah populasi, pemerintah provinsi secara umum harus meningkatkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan lulusan perguruan tinggi sehingga terjadi aglomerasi ekonomi. Namun demikian, penambahan jumlah tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penurunan *marginal product of labor*, penurunan upah, dan peningkatan *commuting cost* yang pada akhirnya mengurangi rasio jumlah penduduk perkotaan per jumlah populasi total.

### **5.3 Keterbatasan Studi dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini harus memiliki data yang lebih panjang dan lengkap, tidak hanya periode 1994-2007, sehingga hasil estimasinya bisa mencerminkan kenyataan yang lebih baik dari perekonomian provinsi-provinsi di Indonesia. Selain itu, variabel-variabel yang sekiranya relevan dan berpengaruh terhadap variabel dependen dimasukkan dalam model sehingga lebih fleksibel, artinya tidak fokus mengikuti sebuah model tertentu seperti pada penelitian ini. Selain itu, fakta-fakta terkait dengan analisis hasil harus lebih banyak sehingga kualitas analisisnya menjadi lebih baik dan objektif. Terakhir, hitungan mengenai kontribusi populasi terhadap suatu provinsi harus dihitung lebih detail sehingga tidak terjadi *bias*.